

**PENGARUH INFORMASI PEMILU DALAM MEMBENTUK
PRILAKU MEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA**

RISET PEMILU

Oleh ;

KPU KABUPATEN BATU BARA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
LIMA PULUH
2015**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Riset ini telah Presentasikan di Depan Tim Penguji Riset
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta oleh ;

Nama :
Jabatan :
Program :
Pada hari, tanggal :
Waktu :

TIM PENGUJI

P-ENGUJI I ; _____ (.....)

PENGUJI II ; _____ (.....)

PENGUJI III ; _____ (.....)

PERNYATAAN

Dengan ini, menyatakan dengan sungguh-sungguh ;

1. Menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa riset penelitian ini adalah hasil karya dan tulisan KPU Kabupaten Batu Bara bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam riset penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah dibuat pihak lain atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis pada tinjauan pustaka dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.
4. Demikian riset penelitian ini dibuat dan disusun sebagai dasar pertimbangan pihak yang berkepetingan. Bila kemudian hari pernyataan ini tidak benar bersedia untuk menerima sanksi.

Lima Puluh, 30 Juni 2015

Yang menyatakan,

1. Muksin Kalid, SE _____
2. Taufik Abdi Hidayat, S.Sos _____
3. Mustafa. Shi _____
4. M Amin Lubis. SHi _____
5. Alhusain. ST _____

PENGARUH INFORMASI PEMILU DALAM MEMBENTUK PRILAKU MEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

TAUFIK ABDI HIDAYAT

Tim Perencana

Kata Kunci : *Peningkatan Partisipasi Pemilih*

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Ingin mengetahui dan mengukur seberapa besar pengaruh informasi pemilu di Kabupaten Batu Bara; 2) Ingin mengetahui dan mengukur tingkat prilaku memilih di Kabupaen Batu Bara; 3) dan ingin mengetahui apakah pengaruh pengetahuan dapat membentuk prilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Batu Bara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu penelitian dimaksud untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan yang memberikan gambaran tentang gejala sosial tertentu yang sudah berlangsung.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih yang memiliki hak memilih yakni berusia > 17 Tahun di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan sample sebanyak 100 responden menggunakan metode penarikan sample dari (Alimul, 2011). Kemudian sample dibagi dalam 4 parietas yakni, pertanian, perkotaan, perkebunan dan perkotaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan mengumpulkan data-data yang dimiliki KPU Kabupaten Batu Bara sebagai referensi riset ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui kuesioner.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden, secara aksidental (*accidental*) yaitu dengan mengambil keseluruhan sampel atau total sampel dilakukan dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia. Sampel yang digunakan adalah seluruh pemilih yang ikut memilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Riset Penelitian ini yang berjudul *“Pengaruh Informasi Pemilu Dalam Membentuk Prilaku Memilih Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”* dapat diselesaikan.

Riset ini disusun berdasarkan SuratKetua KPU RI nomor 155/KPU/IV/2015, tanggal 6 April 2015, Tentang Pedoman Riset Tentang Partisipasi Dalam Pemilu. Semoga dapat memberi arah kepada penegakan demokrasi dimasa yang akan datang dan menjadi bahan pembanding bagi semua pihak yang berkepentingan serta dapat menjadi penguatan kelembagaan demokrasi Komisi Pemilihan Umum dan perbaikan proses politik di Indonesia.

Selaku penyelenggara dan penyusun riset ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut menyukseskan dan membantu terselenggaranya pelaksanaan riset.

Secara khusus, ucapkan terima kasih ditujukan kepada para mantan anggota KPPS,PPS dan PPK se-Kabupaten Batu Bara dan segenap jajaran sekretariat yang telah turut membantu/memfasilitasi segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan riset Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 kabupaten Batu Bara.

Selain itu ucapan terimakasih kepada Ibu Jamilah MPd dosen Universitas Sumatera Utara (USU) dan Bapak Muhammad Arif dosen Universitas Negeri Medan (Unimed) selaku konsultan yang turut serta membantu dan membimbing hingga rampungnya riset penelitian ini.

Semoga riset penelitian Pengaruh Informasi Pemilu dalam Membentuk Perilaku Memilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dapat menjadi momentum untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Amin.

Lima Puluh, 30 Juni 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

(MUKSIN KALID SE)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologi atau *Mazhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behavior)*, diprakarsai Paul Lazarsfeld (1944) menjelaskan bahwa, karakteristik dan pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama, dan lainnya sebagai faktor yang membentuk perilaku pemilih.

Tapi secara metodologis, pendekatan sosiologi dianggap sulit diukur validitasnya sehingga muncul reaksi ketidakpuasan di terhadap pendekatan yang berkembang saat ini, dengan tawaran pendekatan psikologi yang juga disebut *Mazhab Michigan (The Michigan Survey Research Center)*.

Pendekatan ini mengembangkan konsep psikologi khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku pemilih, pertama kali diperkenalkan oleh *Campbell, Converse, Miller dan Stokes (1948)*.¹

Menurut *Anthony Downs dalam Economic Theory of Democracy (1957)*.² Artinya, peristiwa-peristiwa politik tertentu dapat mengubah referensi pilihan seseorang. Dalam pendekatan pilihan rasional ini, dipaparkan dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat.

Orientasi isu berpusat pada pertanyaan; apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi

¹ Stokes, D. E., Campbell, A. & Miller, W. E. (1958). Components of electoral decision. *American Political Science Review*, 52, 367-387.

² Downs, Anthony. 1965. "A Theory of Bureaucracy". *The American Economic Review*. Vol. 55, No. 1/2 (Mar. 1, 1965), pp. 439-446. Diakses pada 14 Mei 2015 melalui <http://www.jstor.org/stable/1816286>

masyarakat? Dan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Di sinilah para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pemilih menggunakan hak suaranya tanpa harapan yang rasional untuk mengubah hasil. Yang dia dapatkan adalah imbalan emosional. Pemilih sebenarnya tidak selalu rasional dalam menyalurkan suaranya. Mereka tidak mempunyai pemahaman yang benar terhadap berbagai topik (terutama ekonomi) yang sering diusung oleh kandidat.

Usaha untuk menambah pemahaman tentang kandidat memerlukan waktu dan juga pemikiran, bahkan terkadang biaya. Sementara keputusan yang berdasarkan emosi bisa dibilang gratis. Ini salah satu sebab hasil Pemilu tidak selalu mewakili kepentingan rasional pemilih. Sebab lain adalah karena sistem suara terbanyak tidak selalu bisa mewakili kepentingan sosial yang merupakan agregasi dari berbagai kepentingan individu (*Kenneth Arrow's Impossibility Theorem*).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran tingkat perilaku memilih pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2014?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Murni

Untuk mengetahui gambaran tingkat perilaku memilih pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2014.

2. Tujuan Terapan

- a. Untuk mengetahui pengetahuan perilaku memilih berdasarkan umur di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2014;
- b. Untuk mengetahui pengetahuan perilaku memilih berdasarkan Pendidikan di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2014;
- c. Untuk mengetahui pengetahuan perilaku memilih berdasarkan pekerjaan di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2014;
- d. Untuk mengetahui pengetahuan perilaku memilih berdasarkan tempat tinggal di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti merupakan pengalaman berharga dalam rangka menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, dan penerapan ilmu dari pendidikan serta pengembangan diri, khususnya di bidang penelitian lapangan.

b. Bagi Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi akademisi dan praktisi pendidikan, sekaligus sebagai sumber bahan bacaan dalam reprints di perpustakaan.

c. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi penyelenggara Komisi Pemilihan Umum RI khususnya KPU Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku pemilih pada pelaksanaan pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

d. Bagi Pemilih

Sebagai masukan dan bahan bagi pemilih guna meningkatkan pengetahuan tentang peran serta masyarakat dalam sukseskan pemilu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Responden

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pemilih agar lebih meningkatkan Pengetahuan tentang informasi pemilu dan dapat mengukur besaran kualitas pemilih dalam memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2014.

b. Bagi Penyelenggara

Sebagai bahan masukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan penyelenggara pemilu tentang perilaku pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetahuan

1. Defenisi Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu, pengindraan terjadi melalui panca indra manusia yakni, indra penglihatan, penciuman, rasa, raba sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata telinga.³

Pengukuran pengetahuan yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung (wawancara) atau melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis dan angket, yang menanyakan isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian. Kedalaman pengetahuan yang ingin diketahui dan diukur dapat disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pengetahuan.

Kriteria standar *absolute* menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagai berikut:

- 1) Kategori baik = 76-100.
- 2) Kategori cukup = 56-75.
- 3) Kategori kurang = 40-55.⁴

2. Tingkat Pengetahuan

Perilaku manusia mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, perilaku dibagi dalam tiga domain (kawasan), yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Hal ini diperlukan untuk tujuan pendidikan yaitu

³ Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta. h:121

⁴ Suharsimi Arikunto. 1996. Prosedur Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta. h:29

mengembangkan atau meningkatkan ketiga domain diukur dari pengetahuan, sikap, dan praktek/tindakan sehubungan dengan materi yang diberikan.

Terbentuknya suatu perilaku baru dimulai pada domain kognitif, dalam arti tahu terlebih dahulu stimulus yang berupa materi atau obyek sehingga menimbulkan pengetahuan baru, selanjutnya menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap. Tingkat pengetahuan dibagi menjadi enam tingkatan yaitu:⁵

a). Tahu (*Know*)

Diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recull*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajarinya antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b). Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan menyebutkan. Contoh : menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap obyek yang dipelajari.

c). Aplikasi

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi dapat diartikan

⁵ Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta. h:137

sebagai penggunaan hukum rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau langsung.

d). Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek kedalam komponen-komponen tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dan penggunaan kata-kata kerja, dapat menggambar (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e). Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

f). Evaluasi

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau obyek penilaian berdasarkan suatu kriteria yang telah ada. Pengaturan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian, keadaan pengetahuan yang ingin kita ketahui.

Berdasarkan teori diatas, pengetahuan yang dimiliki seseorang akan melalui tahapan yaitu: tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi.

B. Cara Memperoleh Pengetahuan

Cara memperoleh kebenaran pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Cara Tradisional dan Non-ilmiah

Cara kuno atau tradisional yang dipakai orang untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Cara penemuan pengetahuan pada periode ini antara lain:

a. Cara coba-salah (*Trial and Error*)

Memperoleh pengetahuan melalui coba-salah atau lebih dikenal dengan kata "*trial and error*". Cara ini telah dipakai sebelum adanya kebudayaan, bahkan sebelum adanya peradaban. Sekarang metode ini masih sering digunakan, terutama oleh mereka yang belum atau tidak mengetahui suatu cara tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

b. Cara kekuasaan atau otoritas

Pengetahuan diperoleh berdasarkan pada otoritas atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pimpinan agama, maupun ahli ilmu pengetahuan. Prinsip dari metode ini adalah orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas, tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikan kebenarannya, baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan penalaran sendiri.

c. Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Cara ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

d. Melalui jalan pikiran

Memperoleh kebenaran pengetahuan, manusia telah menggunakan jalan pikirannya dengan cara melahirkan pemikiran secara tidak langsung melalui pernyataan-pernyataan yang dikemukakan, kemudian dicari hubungannya sehingga dapat dibuat suatu simpulan.

2. Cara modern atau cara ilmiah

Memperoleh pengetahuan yang lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Disebut juga dengan “metode penelitian ilmiah”, atau lebih populer disebut metodologi penelitian (*research methodology*).⁶

C. Kedudukan Pengetahuan dalam Perilaku

Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dengan pengetahuan juga dapat membentuk keyakinan tertentu, sehingga masyarakat berperilaku sesuai keyakinan tersebut.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

1. Umur

Umur adalah bahwa makin tua umur seseorang maka proses –proses perkembangan mentalnya bertambahnya baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat ketika berumur belasan tahun. Selain itu juga mengemukakan bahwa daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi umur.⁷

Kategori pembagian umur dapat dibuat sebagai berikut;

a. < 20 Tahun

b. 20-35 Tahun

⁶ ibid

⁷ Hendra, Aw.2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan. Available:[http://ajang-berkarya.wordpress.com/2008/06/07Konsep Pengetahuan/17/05/2015](http://ajang-berkarya.wordpress.com/2008/06/07Konsep%20Pengetahuan/17/05/2015).

c. > 35 Tahun⁸

2. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih matang pada diri individu kelompok atau masyarakat.

E. Sumber Informasi

Informasi adalah alat bantu pendidikan disebut media pendidikan karena alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan sosial bagi masyarakat.

1. Media Pendidikan Pemilih

Media pendidikan pemilih adalah alat bantu pendidikan pemilih merupakan alat saluran untuk menyampaikan pesan pemilu karena alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan –pesan informasi pemilu bagi masyarakat.

a. Media Cetak

Media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan – pesan pemilu dan menjadi media sosialisasi bagi penyelenggara pemilu antara lain :

- 1) Booklet ialah suatu media untuk menyampaikan pesan – pesan pemilu dalam bentuk buku, baik tulisan maupun gambar.
- 2) Leaflet adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan – pesan pemilu melalui lembaran yang dilipat, isi informasi dapat dalam kalimat maupun gambar atau kombinasi.

⁸ Ariani, N., (2010), *Pembelajaran Multimedia di Sekolah*, Penerbit Prestasi Pustakaraya, Jakarta.hlm:20

- 3) Flyer (selebaran) ialah seperti leaflet tetap tidak dalam bentuk lipatan.
- 4) Flip chart (lembaran Balik) adalah media menyampaikan pesan atau informasi – informasi pemilu dalam bentuk lembar balik.
- 5) Rubrik atau tulisan – tulisan pada surat kabar atau majalah, mengenai bahasan suatu masalah pemilu, atau hal –hal yang berkaitan dengan perilaku pemilih.
- 6) Poster ialah bentuk medis cetak berisi pesan –pesan atau informasi pemilu yang biasanya ditempel ditembok – tembok, ditempat – tempat umum.
- 7) Foto yang mengungkapkan informasi – informasi pemilu.

b. Media Elektronik

Media elektronik sebagai saran untuk menyampaikan pesan – pesan atau informasi pemilu dan jenisnya berbeda – beda, antara lain :

- 1) Televisi adalah penyampaian pesan atau informasi – informasi pemilu melalui media televisi dapat dalam bentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi atau tanya jawab sekitar masalah pemilu, pidato (ceramah), televisi, sport, Quis, atau cerdas cermat dan sebagainya.
- 2) Radio adalah penyampaian informasi atau pesan – pesan pemilu, melalui radio juga dapat berbentuk macam – macam atara lain obrolan 9 tanya jawab, sandiwara radio, ceramah, radio sport, dan sebagainya.
- 3) Video adalah penyampaian informasi atau pesan – pesan pemilu dapat melalui video.

- 4) Slide adalah juga dapat di gunakan untuk menyampaikan pesan – pesan pemilu atau informasi – informasi pemilu.
- 5) Flim strip juga dapat di gunakan untuk menyampaikan pesan – pesan pemilu.

c. Media Papan

Papan (bill board) yang di pasang di tempat – tempat umum dipakai dan diisi dengan pesan – pesan atau informasi – informasi pemilu.⁹

F. Perilaku Pemilih

Studi tentang perilaku pemilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis.

Menurut **Firmanzah** secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.¹⁰ Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.

Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologi, pendekatan ini lahir dari buah penelitian Sosiolog, **Paul F.**

⁹ Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta. h:139

¹⁰ Efriza. 2012, *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta: Bandung, hlm:480

Lazersfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University. 12 Karenanya model ini juga disebut Mazhab Columbia (Columbia School).¹¹

Menurut teori ini, setiap manusia terikat didalam berbagai lingkaran sosial, setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dsb. Lazeersfeld menerapkan cara pikir ini kepada pemilih. Seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu : status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi.

Namun konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.¹²

Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat, menjelaskan bahwa faktor agama menjadi hal yang dipercaya sangat berpengaruh dalam konteks pendekatan sosiologis.

Dalam bukunya, Dieter Roth menjelaskan bahwa pendekatan sosial psikologi berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi partai. Orientasi kandidat dan orientasi isu/utama. Inti dasar

¹¹ Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. h:49

¹² ibid

pemikiran ini dituangkan dalam bentuk sebuah variabel yakni identifikasi partai (*party identification*).¹³

Dalam pendekatan yang sama, **Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi** dalam bukunya *Kuasa Rakyat* (2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam Pemilu atau Pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*).

Prof. Miriam Budiardjo, mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹⁴

Perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu adalah respons psikologis dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara mencoblos surat suara. Menurut **Josep Kristiadi** penelitian mengenai voting behavior dalam pemilu pada dasarnya mempergunakan beberapa mazhab yang telah berkembang selama ini yakni;

¹³ ibdi

¹⁴ Miriam Budiardjo. Prof, 1992. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Utama.h.136

1. Pendekatan Sosiologis

Mazhab sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa yang kemudian berkembang di Amerika Serikat, yang pertama kali dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial *Universitas Colombia (Colombia`s University Bureau of Applied Social Science)*, sehingga lebih di kenal dengan kelompok Colombia. Kelompok ini melakukan penelitian mengenai *The People`s Choice* pada tahun 1948 dan *Voting* pada tahun 1952. Di dalam 2 karya tersebut terungkap perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

2. Pendekatan Psikologis

Mazhab ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survey Universitas Michigan (*University of Michigan`s Survey Research Centre*) sehingga kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok Michigan. Hasil penelitian kelompok ini yang dikenal luas adalah *The Voter`s Decide* (1954) dan *The American Voter* (1960).

Pendekatan mazhab psikologis ini menekankan kepada 3 aspek variabel psikologis sebagai telaah utamanya yakni, ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap kandidat. Inti dari mazhab ini adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang.

3. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini mempergunakan pendekatan ekonomi yang sering pula disebut sebagai pendekatan rasional. Tokoh dalam pendekatan ini antara lain Downs dengan karyanya "*An Economic Theory of Democracy*" (1957) dan Riker & Ordeshook, yang dituangkan dalam tulisan berjudul "*A Theory of the Calculus Voting*", (1962). Para penganut aliran ini mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu berdasarkan perhitungan, tentang apa yang di peroleh bila seseorang menentukan pilihannya, baik terhadap calon presiden maupun anggota parlemen.

G. Konsep Perilaku

Konsep perilaku menurut Prof. Dr. H. M. Joesoef Simbolon, SpKJ(K) Artinya tidak sama antar dan inter manusianya baik dalam halkepandaian, bakat, sikap, minatmaupunkepribadian. Contohnya sidik jari yangselalu di ambil oleh polisi sebagai data informasi phisik manusia ternyata tidak adaiyang sama (berbeda) pada setiap manusia, didunia, walaupun kembar sekalipun.

H. Pemilih

Joko J. Prihatmoko menjelaskan bahwa pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi ¹⁵

¹⁵ Joko J. Prihatmoko . 2008. Mendemokratiskan pemilu dari sistem sampai elemen teknis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 46

Pemilih (1) adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin berwarganegara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu. (menurut; Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 42 Tahun 2008.

I. Partisipasi Masyarakat

Sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri.

Artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM (HakAsasi Manusia), hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokratis *deliberative*. Sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi berkaitan dengan HAM dengan cara lainnya.

Jika HAM lebih dari sekedar pernyataan dalam deklarasi yaitu jika partisipasi berakibat membangun secara aktif kultur HAM-sehingga menjamin berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah suatu kontribusi signifikan bagi pembangunan kultur HAM, suatu kebudayaan yang partisipasi warga negaranya merupakan proses yang diharapkan normal dalam suatu upaya pembuatan keputusan.

Arti partisipasi sering disangkutpautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok.

J. Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang. Apakah yang dinamakan partisipasi politik, Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi partai politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contatcting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.¹⁶

Pengertian partisipasi menurut beberapa ahli yakni:

1. **Keith Fauls:** Dalam bukunya, *Political Sociology: A Critical Introduction*, Keith Faul memberikan batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engage ment*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup

¹⁶ Ibid

keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.¹⁷

2. **Herbert McClosky**: Dalam bukunya, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Herbert McClosky memberikan batasan partisipasi politik sebagai “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.¹⁸
3. **Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson**: Dalam bukunya, *No Easy Choice*.
4. **Huntington dan Nelson**(*Political Participation in Developing Countries*), membuat batasan partisipasi politik sebagai “kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau seponatan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, edic, fektif atau tidak efektif”.
5. **Michael Rush dan Philip Althoff**: Dalam bukunya *Sosiologi Politik*, Rush dan Althoff memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik. Beberapa pandangan ahli tentang tipologi partisipasi politik.

K. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk – bentuk partisipasi menurut beberapa para ahli yakni:

¹⁷Mariam Budiardjo. Op.Cit. H. 1-2

¹⁸Ibid, h.180

Dafid F Roth dan Frank L Wilsion, Dalam buku *The Comparative Study of politics*, Roth dan Wilson membuat tripologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi. Pandangan Roth dan Wilson tentang piramida politik menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Intensitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas politik di kenal sebagai aktivis.¹⁹

Adapun yang termasuk dalam kelompok aktivis adalah Intensitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas politik di kenal sebagai aktivis. Adapun yang termasuk dalam kelompok yang mengurus organisasi secara penuh waktu (*full-time*). Termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan politik dipandang menyimpang atau negatif seperti pembunuh politik, teroris, atau pelaku pembajakan untuk meraih tujuan politik.

Lapisan berikutnya setelah lapisan puncak piramida dikenal dengan partisipan. Kelompok ini mencakup berbagai aktivitas sebagai petugas atau juru kampanye, mereka yang terlibat dalam partai politik atau kelompok kepentingan. Mereka ikut dalam kegiatan politik yang tidak banyak menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensif dan jarang melakukannya.

Sedangkan lapisan terbawah adalah kelompok orang yang apolitis, yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik.

1. Michael Rush dan Philip Althoff, mengajukan hierarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau

¹⁹ Ibid, h.180

administrative. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperhatikan oleh bagan hirarki partisipasi politik dimana garis vertikal segitiga menunjukan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

2. **Gabriel A. Almond**, dalam buku perbandingan Sistem Politik yang disunting oleh Mas'ood dan MacAndrews, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu: (1) Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern; (2) Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

L. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu:

1. Pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi politik.

Menurut **Heidjrahman** mengatakan pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Oleh karena itu, pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa, dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Makin tinggi pendidikan

masyarakat menjadi makin tinggi kesadaran politiknya. Demikian juga sebaliknya, makin rendah tingkat pendidikannya, makin rendah pula tingkat kesadaran politiknya.²⁰

Menurut **Dr.B. Siswanto Sastrohadiwiryo** berdasarkan sifatnya, pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: (a) Pendidikan Umum, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam dan diluar sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mempersiapkan dan mengusahakan para peserta pendidikan memperoleh pengetahuan umum; (b) Pendidikan Kejuruan, yaitu pendidikan umum yang direncanakan untuk mempersiapkan para peserta pendidikan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang kejuruannya;

2. Perbedaan jenis kelamin dan status sosial-ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik.

Tingkat partisipasi politik memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Artinya bahwa kemajuan sosial ekonomi suatu negara dapat mendorong tingginya tingkat partisipasi rakyat. Partisipasi itu juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partisipasi politiknya menunjukkan drajat kepentingan mereka. Kedudukan sosial tertentu, misalnya orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, akan memiliki tingkat partisipasi politik yang cenderung lebih tinggi daripada orang yang hanya memiliki kedudukan social yang rendah. Orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah;

²⁰ Heidjrachmant, 1990. Pelatihan Ketenagakerjaan, Jakarta: Aneka cipta, h:770

3. Media massa berfungsi sebagai penyampai informasi tentang perkembangan politik nasional maupun lokal. Media massa dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan media massa juga mencerminkan jiwa zaman.

M. Budaya Politik

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikaporientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.²¹ suatu pemberitaan. Media massa juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dikarenakan para calon kandidat menyampaikan visi-misinya melalui media yang ada, baik itu media elektronik seperti TV, dan Radio maupun media cetak seperti Koran;

Alfian, menganggap bahwa lahirnya kebudayaan sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama.³¹

²¹ Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Budaya Politik, Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara, Jakarta : Bumi Aksara. H:13

Aktivitas kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setia partai, dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara. Dengan memahami budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak dua manfaat, yakni:

1. Sikap-sikap warga Negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan -tuntutan, tanggapannya, dukungannya serta orientasinya.
2. Memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatan dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat di mengerti. Budaya politik selalu intern pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern.

Almond dan Verba melihat bahwa pandangan tentang obyek politik, terdapat tiga komponen yakni:

1. ***Orientasi kognitif***: yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya;
2. ***Orientasi afektif***: yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya;
3. ***Orientasi evaluatif***: yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Dalam kebudayaannya sebagai subkultur, kebudayaan politik dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat secara umum. Kebudayaan politik menjadi penting dipelajari karena ada dua sistem:

1. Sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan itu di utarakan, respon dan dukungan terhadap golongan elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa;
2. dengan mengerti sikap hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil.

N. Bentuk-bentuk budaya Politik

1. Tipe Budaya Politik:

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap "militan" atau sifat "tolerasi".

- a. Budaya Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan. Politik Militan: Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang pribadi selalu sensitif dan membakar emosi;
- b. Budaya Politik Toleransi: Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang. Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan,

maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa toleransi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan.

2. Budaya Politik terbagi atas:

a. Budaya politik yang memiliki sikap mental absolute,

Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan(bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru;

b. budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif,

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya

yang harus diawasi dan dikendalikan. Perubahan dianggap sebagaipenyimpangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

3. Berdasarkan Orientasi Politiknya.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut:

- a. Budaya Politik parokial (*parochial political culture*) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor *kognitif* (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat provincial. Karena wilayah yang terbatas pelaku politik sering memainkan peranannya seiring dengan diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik yang bersikap khas dan berdiri sendiri, yang menonjol dalam budaya politik adalah kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat;
- b. Budaya Politik kaula (*subyek political culture*) yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. anggota masyarakat mempunyai minat perhatian,

mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu menyerah saja pada kepada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan;

- c. Budaya Politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk memberi penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan;
- d. Budaya Politik campuran (*mixed political cultures*) yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang murni.

O. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden.

Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat

mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku.

Pemilu akhirnya dimenangi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

P. Defenisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (1) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. (*Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*).

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden (2) adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*).

Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3) adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. (*Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*).

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden(4) adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(*Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*).²²

Q. Pemerintahan Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni2007, bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati Batu Bara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Kecamatan Lima Puluh.

Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Kabupaten Batu Bara termasuk ke dalam Karesidenan Sumatera Timur.

Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak.Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini.Etnis Jawa atau yang dikenal

²² (*referensi Definisi Hukum, Definisi Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Kamus Hukum, Pengertian Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara pemilihan Umum, UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*)

dengan *Pujakesuma* (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para perkebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura.

Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batu Bara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra.^[4] Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama *luhak* di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut. (wikipedia 16 juni 2007)

R. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2015

1. Penyelenggaraan Pemilu

a. Bimbingan Teknis

KPU Kabupaten Batu Bara melakukan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan setiap penyelenggara agar mampu menunaikan kewajibannya. Bimbingan teknis dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat kecamatan, desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.

Untuk mempermudah pemahaman setiap penyelenggara sesuai dengan tingkatannya, dilakukan kegiatan secara bertahap, dan dibagi berdasarkan Zona Kepada penyelenggara diinformasikan materi yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.Selain melalui pertemuan berupa rapat kerja, juga dilaksanakan simulasi.

Simulasi dilaksanakan seperti suasana saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.Pihak yang terlibat adalah Anggota KPPS, PPS dan PPK dibawah bimbingan anggota KPU Kabupaten Batu Bara.

b. Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Batu Bara, koordinasi dilakukan kepada pihak terkait.Diantara pihak yang disambangi untuk koordinasi adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Polres Batu Bara dan Komando Distrik Militer (KODIM) 0208 Asahan.

2. Pengelolaan Data dan Informasi Pemilu

Pengelolaan data dan informasi Pemilihan Umum dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Batu Bara berupa Media Center dan ruang kearsipan serta perpustakaan. Pengelolaan data melalui computer yang ditempatkan sesuai dengan sub bagian. Khusus untuk data hasil Pemilihan Umum ditangani oleh sub bagian teknis dan hubmas, baik berupa soft copy maupun hard copy.

Data yang dikelola bukan hanya hasil Pemilihan Umum, melainkan juga menyangkut data penyelenggara di wilayah kerja KPU kabupaten Batu Bara. Informasi Pemilihan Umum didapatkan, selain berupa peraturan perundang-

undangan juga memanfaatkan fasilitas yang tersedia melalui internet pada laman Komisi Pemilihan Umum maupun lembaga terkait.

3. Tahapan Pelaksanaan

a. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

b. Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan dua hal tersebut, menghadapi kendala yang dapat mengganggu kelancaran tugas di KPU Kabupaten Batu Bara. Kendala yang dihadapi dalam pemutakhiran data pemilih adalah :

- 1) Penulisan nama pemilih yang berubah-ubah
- 2) Pemilih tidak aktif untuk mendaftar
- 3) Penyusunan Daftar Pemilih

Daftar pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum disusun berbasis RT/RW. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan nama-nama pemilih dan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Nama-nama pemilih disusun sesuai dengan kedekatan Tempat Pemungutan Suara. Secara umum tidak ditemui kendala dalam penyusunan daftar pemilih.

c. Pencalonan

1) Pendaftaran Peserta Pemilu

KPU Batu Bara tidak menerima pendaftaran peserta pemilu karena hal ini merupakan kewenangan dari KPU RI.

2) Penetapan Peserta Pemilu

Peserta Pemilu di Kabupaten Batu Bara berdasarkan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum.

3) Pengadaan, Pencetakan dan Pendistribusian

a) Pengadaan dan Pencetakan

Secara Umum KPU Kabupaten Batu Bara tidak melakukan pengadaan berupa pencetakan melainkan hanya pengadaan alat kelengkapan TPS dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

b) Pendistribusian

Logistik untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil Presiden di Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan tetap mengutamakan daerah terjauh. Hal ini untuk mengantisipasi masalah yang berhubungan dengan kebutuhan logistic itu sendiri. Dan setiap pendistribusian Logistik tetap melibatkan pihak POLRES Batu Bara, dan Panwas secara berjenjang.

4) Kampanye dan masa tenang.

a) Kampanye

KPU Kabupaten Batu Bara berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menetapkan Lapangan untuk Kampanye terbuka maupun Zona Larangan Pemasangan Alat Praga Kampanye yang dituangkan dalam Keputusan KPU Batu Bara.

b) Masa Tenang

Selama masa tenang, KPU Kabupaten Batu Bara melakukan supervise terhadap persiapan Kelompok Penyelenggaraan

Pemungutan suara. Dan seluruh alat Praga yang terpasang dari masing-masing pasangan calon ditertibkan dengan berkoordinasi dengan Panwas dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

5) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden di wilayah KPU Batu Bara dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014, berlangsung dengan aman, tertib dan sukses.

Sedangkan Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan Calon dilaksanakan mulai pukul 13.30 WIB dengan berpedoman kepada Peraturan KPU nomor 21 Tahun 2014. Proses ini lebih mudah dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 disebabkan jumlah pesertanya tidak banyak.

Meski tidak dapat dipungkiri masih juga terdapat kesalahan-kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPPS misalnya dalam pengisian Form C1 tentang data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tetapi hal ini telah diselesaikan pada tingkatan Rekapitulasi di PPS untuk dilakukan pembenaran sebagaimana mestinya, dihadapan para saksi dan Panwaslu.

6) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pelaksanaan Rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat PPS (Desa/Kelurahan), tingkat PPK (Kecamatan) sampai kepada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara

berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlangsung aman, tertib dan lancar.

Kesalahan-kesalahan pada Proses pengadministrasian ditingkat PPS telah diperbaiki di tingkat PPK demikian pula kesalahan yang terjadi ditingkat PPK segera diperbaiki ditingkat KPU Kabupaten Batu Bara disaksikan oleh para saksi dan Panwaslu Kabupaten Batu Bara.



Tabel 2.1. Tingkat partisipasi pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

7) Sosialisasi

Pemilihan umum sebagai pengejawantahan nilai-nilai Demokrasi adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Jika tanpa kejelasan informasi, boleh jadi penyelenggaraan Pemilihan Umum itu akan mengalami kendala. Oleh sebab itu KPU Batu Bara merasa bahwa sosialisasi menjadi sangat perlu dilakukan sebagai alat untuk memberikan pemahaman kepada setiap lapisan Masyarakat.

Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum dilakukan antara lain kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih. Sasaran utama yang ditargetkan adalah pemilih pemula, yaitu para

siswa yang duduk dibangku jenjang pendidikan menengah atas. Disamping itu sosialisasi dilaksanakan kepada anggota organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, kalangan birokrasi, termasuk kepada penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

8) Sengketa

Ketika Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dilanjutkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pasangan Calon ditingkat PPS dan PPK, sampai kepada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU Batu Bara tidak ada masalah apapun, hal ini terlihat jelas tidak ada satupun Form Keberatan saksi dan rekomendasi Panwas. (baik di Form C2, D2, DA2 maupun DB2).

Namun pasca penetapan KPU tentang Calon Presiden terpilih, Pasangan nomor urut 1 (H. Prabowo Subianto dan Ir. H. Hatta Rajasa) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi diawal gugatan Batu Bara tidak termasuk dalam salah satu objek gugatan yang didaftarkan.

Baru setelah perbaikan Permohonan gugatan Pemohon pada tabel ternyata ada 67 (enam puluh tujuh) TPS yang dipermasalahkan yakni sekitar masalah kesalahan administrasi penulisan Data Pemilih dengan Pengguna hak pilih.

Hal ini sebenarnya sebagaimana telah diterangkan telah diperbaiki disatu tingkatan masing-masing saat Rekapitulasi. Kendati demikian KPU Batu Bara sesuai dengan Edaran KPU RI tetap menyampaikan alat bukti kepersidangan di Mahkamah Konstitusi.

S. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni regulasi dalam bentuk peraturan dan keputusan yang berubah-ubah sehingga menyulitkan penyelenggara menyosialisasikannya dan keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia pada tingkat anggota KPPS, PPS, dan PPK yang dimiliki KPU Kabupaten Batu Bara.

Logistik Pemilu yang datang terlambat dan tidak cukup serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Pemutakhiran Data Pemilih ditingkat PPK dan PPS tiadanya sarana IT. Kesalahan pengadministrasian yang dilakukan KPPS, PPS dan PPK terjadi dalam penulisan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang sulit disebabkan terlalu banyaknya item formulir berupa DPT, DPTb, DPK dan DPKTb yang wajib diisi. Tentunya kategori pengisian daftar pemilih tersebut dapat lebih disederhanakan menjadi 1 (satu) atau 2 (dua) jenis formulirnya, dengan cara membuat regulasi yang mewajibkan setiap calon pemilih untuk aktif mendaftarkan dirinya.

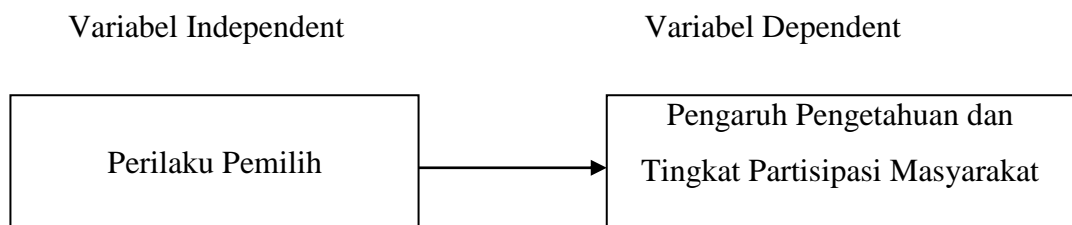
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap satu konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep atau kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran pada penelitian yang dirumuskan dari fakta-fakta, observasi dan tinjauan pustaka.

Tabel. 3.1 Kerangka Konsep



B. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan dan menggunakan data primer dan data sekunder dimana data primer diperoleh secara langsung dari responden, dengan menggunakan kuisisioner secara terbuka tentang pengetahuannya terhadap informasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di kecamatan LimaPuluh Kabupaten Batu Bara.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, memungkinkan pengontrolan maksimal beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akurasi hasil. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan, member nama, situasi atau fenomena yang terjadi pada masa kini.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Gambaran Pengetahuan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Variabel	Defenisi operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Pengetahuan pemilih	Tingkat pengetahuan pemilih	Kuisisioner	<ul style="list-style-type: none"> - Bila baik skor mencapai 76-100 % - Bila Cukup skor mencapai 56-75 % - Bila Kurang skor mencapai 40-55% 	Ordinal
Umur	Usia pemilih saat pemilu	Kuisisioner	<ul style="list-style-type: none"> - 17-20 tahun - 21- 30 tahun - >31 tahun 	Interval
Pendidikan	Pendidikan formal yang pernah di selesaikan pemilih	Kuisisioner	<ul style="list-style-type: none"> - SD - SMP - SMA - PT 	Ordinal
Paritas	Sumber yang didapatkan pemilih	Kuisisioner	<ul style="list-style-type: none"> - Primigravida - Multigravida - Grandemultigravida 	Ordinal
Sumber Informasi	Informasi yang didapat oleh pemilih	Kuisisioner	<ul style="list-style-type: none"> - Media Cetak/eletroni - Sosialisasi Penyelenggara - Media Papan 	Nominal

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian karena jumlah populasi mencukupi untuk dijadikan sampel penelitian.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Populasi pada penelitian ini adalah semua pemilih yang ikut memilih pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sehingga dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pemilih sebanyak 100 orang di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tahun 2015.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Selanjutnya Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden, secara aksidental (*accidental*) yaitu dengan mengambil keseluruhan sampel atau total sampel dilakukan dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia. Sampel yang digunakan adalah seluruh pemilih yang ikut memilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

E. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

1. Jenis Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data dapat berupa :

- a. Pengamatan (Observasi)
- b. Suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan.
- c. Wawancara (Interview)
- d. Suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan seseorang sasaran penelitian (responden).
- e. Angket
- f. Suatu cara pengumpulan data atau suatu penelitian mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak).

2. Cara Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data ini merupakan cara penelitian untuk mengumpulkan data dalam penelitian, sebelum dilakukan pengumpulan data, peneliti harus melihat alat ukur pengumpulan data agar dapat memperkuat hasil penelitian, alat ukur penelitian tersebut berupa : kuisisioner, observasi, dan wawancara.

Dalam penelitian ini mengambil data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu data langsung diperoleh atau diambil oleh peneliti. Berdasarkan konsep teori tentang gambaran pengetahuan perilaku pemilih.

F. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses data yang dilakukan setelah data di peroleh melalui tahapan penelitian, editing, coding, dan data tabulating, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Editing

Editing adalah proses data yang dilakukan setelah data yang telah di peroleh atau dikumpulkan.

b. Coding

Coding merupakan kegiatan memberikan kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri dari beberapa kategori.

c. Tabulating

Kegiatan memasukan data yang telah dikumpulkan kedalam master table atau data base computer, kemudian membuat distribusi frekuensi.

2. Analisa Data

Analisa data berfungsi untuk meringkas, mengklasifikasikan dan menyajikan data, analisa merupakan langkah awal untuk melakukan analisis dan uji statistik lebih lanjut.

Analisa data dalam penelitian ini disajikan secara diskritif dengan melihat presentasi data yang terkumpul lalu membahas hasil dengan menggunakan teori dan kepuasan yang ada.

Untuk mempermudah pengolahan data, analisis data serta pengambilan kesimpulan digunakan rumus :

H. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner yang dipersiapkan sebelumnya. Berisi tentang data tingkat pengetahuan pemilih tentang perilaku pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan memberikan pertanyaan secara tertulis dimana responden tinggal memilih atau menjawab pada jawaban yang sudah disediakan.

Bentuk pertanyaan ini bersifat terbuka dengan jumlah pertanyaan sebanyak 20. Penelitian dilakukan dengan menggunakan skala Guttman yang menyediakan dua Alternative jawaban yaitu :

1. Bila jawab benar : skor 1
2. Bila jawab salah : skor nol

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karakteristik pemilih berdasarkan umur, pendidikan, sumber informasi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner ini merupakan alat ukur berupa angket dengan 20 pertanyaan, jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0.

Dimana jenis kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuisisioner tertutup dimana kuisisioner ini berstruktur dengan angket tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga responden hanya tinggal memilih atau menjawab pada jawaban yang sudah ada.

Kuisisioner adalah sebagai daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, sudah matang, dimana responden (dalam hal angket), dan interview (dalam hal wawancara) tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu.

Rentangan pengetahuan seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan Kategori menjadi 3 dalam penilaian sebagai berikut :

1. Baik : Bila Mampu menjawab yang Benar 16-20 (76%-100%)
2. Cukup : Bila mampu menjawab yang Benar 11-15 (56%-75%)
3. Kurang : Bila kemampuan menjawab yang benar 8-10 (40-55%)

Dalam data ini mengambil data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu data langsung diperoleh atau diambil oleh peneliti melalui tehnik wawancara dalam responden dengan menggunakan kuisisioner yang telah disusun oleh peneliti. Berdasarkan konsep teori tentang “Gambaran pengetahuan pemilih tentang perilaku pemilih”.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara membagikan kuisisioner yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dalam Membentuk Perilaku Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Batu Bara Tahun 2014” maka dapat hasil pengetahuan sebagai berikut :

1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Pengetahuan

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Perilaku Pemilih Berdasarkan Pengetahuan

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Baik	93	93
2.	Cukup	7	7
3.	Kurang	0	-
Total		100	100

Dari data diatas dipahami bahwa pengetahuan pemilih tentang perilaku pemilih diambil dari 100 responden adalah mayoritas berpengetahuan Baik sebanyak 93 responden (93 %).

2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Umur

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Perilaku Pemilih Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	%
1.	17-20	8	8
2.	21-30	34	34
3.	>30	58	58
Total		100	100

Berdasarkan Tabel distribusi di atas dapat diketahui dari 100 responden, berdasarkan umur mayoritas pada klasifikasi umur >30 tahun sebanyak 58 orang (58 %).

3. Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Perilaku Pemilih Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	SD	20	20
2.	SMP	15	15
3.	SMA	54	54
4.	PT	11	11
Total		100	100

Berdasarkan Tabel distribusi diatas dapat diketahui dari 100 responden tentang perilaku pemilih, berdasarkan Pendidikan mayoritas pada klasifikasi Pendidikan SMA sebanyak 54 orang (54%)

4. Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Paritas

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Perilaku Pemilih Berdasarkan Paritas

No.	Paritas	Frekuensi	%
1.	Nelayan	25	25
2.	Pertanian	25	25
3.	Perkebunan	25	25
4.	Perkotaan	25	25
Total		100	100

Berdasarkan Tabel distribusi di atas dapat diketahui dari 100 responden tentang perilaku pemilih, berdasarkan Paritas tidak memiliki mayoritas dan diklasifikasi sama yakni nelayan sebanyak 25 orang (25 %).

5. Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Informasi

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Karakteristik Perilaku Pemilih Berdasarkan Informasi

No.	Sumber Informasi	Frekuensi	%
1.	Media Elektronik/Cetak	62	62
2.	Sosialisasi Penyelenggara Pemilu	38	38
Total		100	100

Berdasarkan Tabel distribusi di atas dapat diketahui dari 100 responden tentang perilaku pemilih, berdasarkan sumber informasi mayoritas pada klasifikasi Media Elektronik/Cetak sebanyak 62 orang (62%).

6. Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Umur

Tabel 4.1.6 Distribusi Frekuensi Karakteristik Pengetahuan dan Umur

No.	Umur	Pengetahuan							
		Baik		Cukup		Kurang		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	17-20	7	7	1	1	-	-	8	8
2.	21-30	32	32	2	2	-	-	34	34
3.	>30	54	54	4	4	-	-	58	58
Total		93	93	7	7	-	-	100	100

Dari tabel distribusi frekuensi Pengetahuan pemilih Tentang pemilu berdasarkan Umur di Kecamatan Lima Puluh Tahun 2014 dengan Total sampel 100 orang mayoritas berpengetahuan Baik pada Umur >30 sebanyak 93 orang (93%), responden berpengetahuan Cukup pada umur >30 sebanyak 4 orang (4 %), Minoritas responden yang berpengetahuan Baik pada Umur 17-20 tahun sebanyak 7 (7%).

7. Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1.7 Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-Laki	46	46
2.	Perempuan	54	54
Total		100	100

Berdasarkan Tabel distribusi di atas dapat diketahui dari 100 responden tentang perilaku pemilih, berdasarkan Jenis Kelamin mayoritas pada klasifikasi Perempuan sebanyak 54 orang (54%).

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan pemilih Tentang pemilu di Kecamatan Lima Puluh kabupaten Batu Bara maka hasil Pembahasan Sebagai Berikut :

Tabel. 4.2. Gambaran Pengetahuan Pemilih tentang Pemilu di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	PENDIDIKAN	ALAMAT	PEKERJAAN	PENGETAHUAN	SUMBER INFORMASI	
2	FAISAL	L	31	SMA	LIMA PULUH	WIRASWASTA	11	A	
4	IRFAN ZAILANI	L	32	DIPLOMA	LIMA PULUH	PNS	12	A	
8	ASWANDI	L	38	SMP	LIMA PULUH	WIRASWASTA	10	B	
11	KHAIRUL HUSNI	L	25	SMA	LIMA PULUH	PEDAGANG	10	B	
12	M SIDIK	L	65	SMP	LIMA PULUH	PEDAGANG	11	A	
14	SURIADI	L	28	SMA	LIMA PULUH	WIRASWASTA	10	A	
16	JUMALIK	L	55	SMA	LIMA PULUH	PENSIUNAN	10	A	46
26	WANDI	L	25	SMA	PERUPUK	WIRASWASTA	10	B	54
28	UCOK	L	50	SD	PERUPUK	NELAYAN	11	B	
29	HERMAN	L	27	SMP	PERUPUK	NELAYAN	11	A	
30	RICKY	L	42	SD	PERUPUK	NELAYAN	10	B	
31	HARUN	L	18	SMP	PERUPUK	NELAYAN	11	B	
33	ROSIB	L	52	SMP	PERUPUK	NELAYAN	9	B	
35	M IRFAN	L	45	SMA	PERUPUK	NELAYAN	11	B	
38	HASANUDDIN	L	44	SMA	PERUPUK	PERANGKAT DESA	11	A	
39	BUDI	L	45	SARJANA	PERUPUK	WIRASWASTA	10	A	

40	ALI IMRON	L	28	SARJANA	PERUPUK	WIRASWASTA	11	B	
42	PRISKO INDRATAMA	L	31	SMA	PERUPUK	WIRASWASTA	10	A	
44	ABDUL JALIL	L	33	SARJANA	PERUPUK	PETANI	10	A	
47	WAHYU LESTARI	L	19	SD	PERUPUK	PEDAGANG	10	B	
48	RIZALDI	L	26	SMP	PERUPUK	NELAYAN	10	A	
49	ILHAM ABDI	L	30	SMA	PERUPUK	WIRASWASTA	10	B	
50	NGATINO	L	37	SMA	PERUPUK	PEDAGANG	10	B	
52	HASBI	L	53	SD	AIR HITAM	WIRASWASTA	12	A	
54	AMINUDDIN	L	43	SMA	AIR HITAM	PERANGKAT DESA	11	B	
55	IBRAHIM ALI	L	65	SD	AIR HITAM	PETANI	10	B	
56	AMIR HAMZAH	L	70	SD	AIR HITAM	WIRASWASTA	11	B	
67	HERI KUSNANDAR	L	43	SMA	AIR HITAM	KARYAWAN BUMN	11	B	
68	ERWIN	L	24	SMA	AIR HITAM	MARKETING	12	B	
70	PAIDI SWT	L	44	SMA	AIR HITAM	PETANI	12	A	
73	SUWARNI	L	30	SD	AIR HITAM	PETANI	11	A	
74	MUHAMMAD HENDRO	L	34	SMA	AIR HITAM	PNS	11	A	
77	MARGONO	L	49	SMA	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN SWASTA	12	A	
78	RAHMAD SUSILAWARDI	L	36	SMK	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN	10	A	
80	KAM HENDRA	L	39	SMA	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN	10	A	
81	SUPRAPTO	L	38	SMP	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN SWASTA	12	B	
82	M FADLY	L	25	SMA	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN SWASTA	11	A	
87	TUGIMIN	L	56	SMP	PERK LIMA PULUH	WIRASWASTA	12	B	
88	BOIMEN	L	40	SMA	PERK LIMA PULUH	WIRASWASTA	12	B	
90	PONIRIN	L	54	SMA	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN	11	B	
91	OKI YAUNANDA SYAHPUTRA	L	27	SMA	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN	12	A	
92	AGUS SETIAWAN	L	37	SMA	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN	11	B	
93	NIKO ANDIKA	L	26	DIPLOMA	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN	11	A	
96	EDY MUDA SISWANTO	L	43	SMA	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN SWASTA	12	A	
98	SUGIONO	L	52	SMP	PERK LIMA PULUH	WIRASWASTA	12	B	
99	JOYO NUGROHO	L	31	SMK	PERK LIMA PULUH	KARYAWAN	11	A	
1	EKA ZULFANI LOVA	P	28	SMA	LIMA PULUH	PNS	11	A	
3	LEDY RIDWANY S	P	29	SMK	LIMA PULUH	PEDAGANG	11	B	
5	SEKSI SUTARMI	P	44	SPG	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	9	A	
6	NURHAYATI	P	24	SMA	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	12	B	
7	MARIANI	P	43	SMA	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	11	B	
9	SRI HARTATI	P	32	SMP	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	12	B	
10	YETTY FARADONA	P	30	DIPLOMA	LIMA PULUH	WIRASWASTA	10	A	
13	CINDY	P	28	SMA	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	11	A	
15	JUMIATI	P	50	SMA	LIMA PULUH	PEDAGANG	9	B	
17	SRI WAHYUNI	P	28	SMA	LIMA PULUH	PEGAWAI HONORER	11	B	
18	RISMAWATI	P	29	SMA	LIMA PULUH	PNS	11	A	
19	SUMIATI	P	54	SD	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	11	A	
20	S MELVA BR SIMANJUNTAK	P	54	SMP	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	11	A	
21	SITI FATIMAH	P	50	SD	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	12	A	
22	MURNI FATHIM	P	20	SMA	LIMA PULUH	WIRASWASTA	11	A	

23	SYAFIAH	P	54	SD	LIMA PULUH	PEDAGANG	11	A	
24	ISWANA	P	24	SMA	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	11	A	
25	RUSMINI	P	45	SD	LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	11	A	
27	HAMIDA	P	37	SMA	PERUPUK	PETANI	9	A	
32	SRI MULYANI	P	45	SMA	PERUPUK	IBU RUMAH TANGGA	11	B	
34	ELYUS FAUZIATI	P	27	SMA	PERUPUK	PNS	11	A	
36	AYU WANDIRA	P	26	SMA	PERUPUK	IBU RUMAH TANGGA	12	A	
37	EVA MUTIA	P	25	SMA	PERUPUK	WIRASWASTA	9	B	
41	NURBAINA	P	29	DIPLOMA	PERUPUK	PEGAWAI HONORER	9	A	
43	IRMA ZULAIKA	P	28	SARJANA	PERUPUK	PNS	11	A	
45	TUTI IS FARIDA PANE	P	42	SMA	PERUPUK	IBU RUMAH TANGGA	11	A	
46	JIHANNI	P	24	SD	PERUPUK	WIRASWASTA	11	B	
51	MARIANUM	P	50	SD	AIR HITAM	WIRASWASTA	11	A	
53	RANI	P	28	SD	AIR HITAM	WIRASWASTA	10	A	
57	RAHMAWANTI	P	61	SD	AIR HITAM	PEDAGANG	11	B	
58	ZURIYAH	P	50	SD	AIR HITAM	WIRASWASTA	12	B	
59	NURMALA	P	76	SD	AIR HITAM	IBU RUMAH TANGGA	12	A	
60	KHODIJAH	P	60	SD	AIR HITAM	WIRASWASTA	11	A	
61	SAMSIAR	P	45	SD	AIR HITAM	WIRASWASTA	12	A	
62	IMAI	P	28	SMP	AIR HITAM	IBU RUMAH TANGGA	12	A	
63	NURHASANAH	P	19	SMA	AIR HITAM	PEDAGANG	12	A	
64	SUPIYAH	P	50	SD	AIR HITAM	WIRASWASTA	12	A	
65	ROSMIANA	P	40	SMA	AIR HITAM	PETANI	12	A	
66	NURAINI	P	23	SMA	AIR HITAM	PETANI	11	A	
69	YUSNANI	P	42	SMP	AIR HITAM	WIRASWASTA	12	A	
71	WIDIYA NINGSIH	P	18	SMP	AIR HITAM	PETANI	12	A	
72	SAWIYA	P	38	SMA	AIR HITAM	IBU RUMAH TANGGA	12	A	
75	DYA AYU PUSPANJANI	P	20	SMA	AIR HITAM	MAHASISWA	12	A	
76	SARI DAMAYANTI	P	26	SARJANA	PERK LIMA PULUH	GURU	11	A	
79	TRIA JUMAWANTIKA	P	18	SMA	PERK LIMA PULUH	PELAJAR	12	A	
83	DWI PRATIWI	P	25	SARJANA	PERK LIMA PULUH	GURU	11	A	
84	FISKA	P	31	SMA	PERK LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	12	B	
85	UMMI HARSEPTIANI	P	20	SMK	PERK LIMA PULUH	GURU	9	B	
86	KUSMIANI	P	35	SMP	PERK LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	12	A	
89	SENIWATI	P	52	SMA	PERK LIMA PULUH	WIRASWASTA	11	B	
94	EVIANA	P	30	SARJANA	PERK LIMA PULUH	GURU	11	B	
95	LOLITA VITALOKA	P	22	SMA	PERK LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	12	A	
97	MUHARANI SIMATUPANG	P	33	SMA	PERK LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	11	A	
100	NURHAFNI EULAHA HSB	P	28	SMA	PERK LIMA PULUH	IBU RUMAH TANGGA	11	A	

1. Berdasarkan Pengetahuan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat di ketahui bahwa dari 100 responden mayoritas memiliki pengetahuan yang Baik yakni 93 responden (93%), yang berpengetahuan Cukup sebanyak 7 responden (7%). Hal ini sesuai dengan Hasil penelitian KPU Kabupaten Batu Bara bahwa pengetahuan seseorang dan semakin tinggi pengetahuan seseorang dan semakin sering melakukan pengindraan terhadap suatu objek maka semakin besar peluang memiliki sikap yang baik.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Notoatmojdo, 2011) tentang definisi hal yang memepengaruhi tingkat pengetahuan seseorang yaitu pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini di peroleh orang tersebut melakukan pengindraan manusia yaitu : Penglihatan, Pendengaran, Penciuman, dan Perasa.

2. Berdasarkan Umur

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat di ketahui bahwa dari 100 responden minoritas berusia 17-20 tahun sebanyak 8 responden (8%) berpengetahuan cukup, dan responden mayoritas berusia >30 sebanyak 58 responden (58%) berpengetahuan baik dan yang memilki berpengetahuan Kurang sebanyak 0 responden (0%). Dan berusia 21-30 tahun sebanyak 34 responden (34%).

Hal ini Sesuai dengan hasil penelitian KPU Kabupaten Batu Bara berdasarkan umur adalah *cukup* dan usia pemilih yang semakin bertambah dan didukung oleh pendidikan hanya sebatas SMA sehingga pengetahuan responden hanya sebatas *tahu*, hal ini sesuai dengan pendapat. (Notoadmodjo, 2011) mengatakan bahwa *umur* adalah variebel yang selalu diperhatikan dalam

penyelidikan epidemiologi, semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak sumber informasi yang dijumpai dan semakin banyak dikerjakan sehingga dapat menambah pengetahuan.

3. Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari 100 responden mayoritas berpendidikan SMA sebanyak 54 responden (54%).

Berpendidikan SD sebanyak 20 responden (20%), berpengetahuan Kurang sebanyak 0 responden (0%), yang berpengetahuan Cukup sebanyak 9 responden (9%) yang berpengetahuan Baik sebanyak 11 responden (11 %).

Berpendidikan SMP sebanyak 15 responden (15%) dan berpengetahuan Kurang sebanyak 1 responden (1%), yang berpengetahuan Cukup sebanyak 2 responden (2%), yang berpengetahuan Baik sebanyak 12 responden (12%).

Berpendidikan SMA sebanyak 54 responden (54%), dan berpengetahuan Kurang sebanyak 5 responden (5%), yang berpengetahuan Cukup sebanyak 10 responden (10%) yang berpengetahuan Baik sebanyak 39 responden (39%).

Minoritas berpendidikan PT sebanyak 11 responden (11%) yang berpengetahuan Baik sebanyak 7 responden (7%), dan berpengetahuan Kurang sebanyak 1 responden (1%), yang berpengetahuan Cukup sebanyak 3 responden (3%).

Sesuai dengan hasil penelitian KPU Kabupaten Batu Bara bahwa pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan dimana semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Notoadmodjo, 2011) bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang berarti didalam pendidikan itu terjadi proses

pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih matang pada diri individu kelompok atau masyarakat.

4. Berdasarkan Paritas

Dari hasil penelitian terhadap 100 responden dapat dilihat bahwa berdasarkan paritas nelayan sebanyak 25 responden (25%) dengan mayoritas berpengetahuan Cukup sebanyak 9 responden (9%) yang berpengetahuan Kurang sebanyak 4 responden (4 %) dan yang berpengetahuan baik sebanyak 12 responden (12%).

Paritas pertanian ditemukan sebanyak 25 responden (25%) berpengetahuan kurang sebanyak 0 responden (0%), dan berpengetahuan cukup sebanyak 2 responden (2%) dan berpengetahuan Baik sebanyak 23 responden (23%).

Paritas perkebunan ditemukan sebanyak 25 responden (25%) berpengetahuan kurang sebanyak 1 responden (1%), dan berpengetahuan cukup sebanyak 2 responden (2%) dan berpengetahuan Baik sebanyak 22 responden (22%).

Paritas perkotaan ditemukan sebanyak 25 responden (25%) berpengetahuan kurang sebanyak 2 responden (2%), dan berpengetahuan cukup sebanyak 5 responden (5%) dan berpengetahuan Baik sebanyak 18 responden (18%).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian KPU Kabupaten Batu Bara responden yang berpengetahuan tinggi dengan kategori Baik terdapat pada paritas pertanian yakni sebanyak 23 responden (23%), hal ini menggambarkan adanya pengalaman pemilih tentang pemilu dengan jumlah pemilu yang pernah

dialaminya dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal ini sesuai dengan (Mochtar,) yang menyatakan bahwa yang lebih banyak mengetahui pemilu dan mempengaruhi perilaku pemilih mereka yang memiliki pengalaman tentang pemilu.

5. Berdasarkan Sumber Informasi

Dari hasil penelitian terhadap 100 responden dapat di lihat bahwa mayoritas responden mendapatkan informasi dari media elektronik dan media cetak yaitu sebanyak 62 responden (62%), dengan mayoritas berpengetahuan Cukup sebanyak 9 responden (9 %) yang berpengetahuan Kurang sebanyak 3 responden (3%) dan berpengetahuan Baik sebanyak 50 responden (50%) dan tidak ditemukan pada media cetak sebanyak 0 responden (0%).

Dan dari sosialisasi penyelenggara pemilu sebanyak 38 responden (38%) dengan mayoritas pengetahuan Kurang 4 responden (4%), yang berpengetahuan Cukup sebanyak 8 responden (8%) dan berpengetahuan Baik sebanyak 26 responden (26%).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian KPU Kabupaten Batu Bara bahwa Pengetahuan pemilih tentang pemilu berdasarkan informasi adalah *baik*, hal ini dapat dipengaruhi oleh rasa keingintahuan dan motivasi responden untuk mendapat informasi yang terbaru dalam dunia pemilu.

Hal ini sesuai dengan (Notoadmodjo, 2011) sumber informasi pada tingkatnya adalah alat bantu pendidikan disebut media pendidikan karena alat-alat tersebut merupakan alat bantu untuk menyampaikan informasi, karena alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan – pesan bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan dalam Membentuk Perilaku Memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Batu Bara maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan Pengetahuan

Terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara pengetahuan dan perilaku memilih pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Batu Bara. Dari responden mayoritas berpengetahuan Baik yaitu sebanyak 69 responden (69%). Berarti hipotesis riset diterima.

2. Berdasarkan Umur

Mayoritas umur >30 tahun memiliki pengetahuan baik sebanyak 58 responden (58%).

3. Berdasarkan Pendidikan

Dapat dilihat bahwa dari 100 responden mayoritas berpendidikan SMA sebanyak 54 responden (54%) yang berpengetahuan Baik sebanyak 39 responden (39%).

4. Berdasarkan Paritas

Dapat dilihat dari 100 responden mayoritas paritas berpengetahuan baik yaitu paritas pertanian ditemukan sebanyak 23 responden (23%).

5. Berdasarkan Sumber Informasi

Dapat dilihat dari 100 responden mayoritas mendapatkan sumber informasi dari media-elektronik dan media cetak yaitu sebanyak 62 responden (62%), dengan mayoritas berpengetahuan Baik sebanyak 50 responden (50%).

B. Saran

1. Bagi KPU

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah materi bagi perpustakaan KPU RI bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi pemilih dalam membentuk perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

2. Bagi Pemilih

Diharapkan dapat mengukur dan mengetahui besaran pengetahuan yang dimiliki pemilih tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Batu Bara.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu Pengetahuan serta pengalaman dalam penyusunan suatu Karya Tulis Ilmiah melalui riset Penelitian dan bermanfaat bagi semua pihak baik serta dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan Pemilu dimasa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N., (2010), *Pembelajaran Multimedia di Sekolah*, Penerbit Prestasi Pustakaraya, Jakarta
- Downs, Anthony. 1965. "A Theory of Bureaucracy". The American Economic Review. Vol. 55, No. 1/2 (Mar. 1, 1965), pp. 439-446. Diakses pada 14 Mei 2015 melalui <http://www.jstor.org/stable/1816286>
- Efriza. 2012, *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta: Bandung
- Gabriel A. Almond, Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Heidjrachmant, 1990. *Pelatihan Ketenagakerjaan*, Jakarta:Aneka cipta
- Hendra, Aw.2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan. Available:[http://ajang-berkarya.Wordpress.com/2008/06/07Konsep Pengetahuan/17/05/2015](http://ajang-berkarya.Wordpress.com/2008/06/07KonsepPengetahuan/17/05/2015).
- Joko J. Prihatmoko . 2008. *Mendemokratiskan pemilu dari sistem sampai elemen teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Miriam Budiardjo. Prof, 1992. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Utama.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Stokes, D. E., Campbell, A. & Miller, W. E. (1958). Components of electoral decision. *American Political Science Review*.
- Suharsimi Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008, *Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal 1 Angka 22
- UU Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Pasal 1 Angka 21
- UU Nomor 42 Tahun 2008 *tentang Penyelenggaraan Pemilu*

KUESIONER PENELITIAN

**JUDUL : PENGARUH PENGETAHUAN DALAM MEMBENTUK
PRILAKU MEMILIH PADA PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN
BATU BARA**

A. Identitas Responden

Nama ;

Jenis Kelamin ;

Umur ;

Pendidikan ;

Alamat ;

Pekerjaan ;

B. Petunjuk Pengisian Kues-ioner

1. Pilihlah jawaban yang paling tepat menurut anda dengan cara melingkari jawaban yang tersedia yakni a dan b.
2. Jawablah pertanyaan yang tersedia dengan benar dan jujur.
3. Kuesioner ini dibuat untuk riset penelitian KPU Kabupaten Batu Bara guna penguatan kelembagaan dan pendidikan politik.

C. Variabel Bebas (Pengaruh Pengetahuan)

1. Apakah Anda terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah informasi mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 penting untuk anda ketahui?
 - a. Ya
 - b. Tidak-
3. Informasi apa saja yang- perlu Anda ketahui terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Informasi apa saja yan-g sudah anda ketahui terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Dari manakah anda memperoleh informasi mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?
 - a. Ya
 - b. Tidak

D. Variabel Terikat(Perilaku Memilih)

6. Apa alasan anda datang ke TPS untuk memilih?
 - a. Memenuhi undangan memilih ke TPS dan melaksanakan hak pilih sebagai warga negara
 - b. Calon yang anda sukai
7. Apa kreteria anda memilih salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?
 - a. Calon yang telah berpengalaman dalam memimpin
 - b. Calon yang ganteng, kaya dan kharismatik
8. Apakah calon yang diusung oleh partai yang anda sukai menjadi kreteria anda memilih salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah calon purnawirawan TNI/Polri menjadi kreteria anda memilih salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?.

- a. Ya b. Tidak
10. Menurut anda manfaat memilih adalah....-
- a. Untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional
- b. Perwujudan kedaulatan rakyat
11. Manfaat memilih adalah, kecuali.....
- a. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik
- b. Perwujudan kedaulatan pemimpin
12. Apakah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang telah dilaksanakan mencerminkan negara demokrasi?.
- a. Ya b. Tidak

E. Wawancara

1. Sudah berapa kali saudara ikut menggunakan hak pilih dalam pemilu.....
2. Apakah saudara bingung dalam memilih calon.....
3. Apa kriteria saudara dalam memilih calon pemimpin.....
4. Apa keuntungan saudara datang ke TPS.....
5. Apakah saudara pernah diberi uang untuk memilih salah satu calon.....
6. Apakah politik uang mempengaruhi pilihan saudara.....
7. Menurut saudara apakah pilihan anda sudah layak menjadi pemimpin.....

F. Lembar Jawaban

1. a benar
2. a benar
3. a benar
4. a dan b benar
5. a dan b benar
6. a dan b benar
7. a dan b benar
8. a dan b benar
9. a dan b benar

10. a dan b benar

11. a benar

12. a benar